Evaluasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMN di Lingkungan DJBC





Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN T.A. 2025 DJBC

(ND-4105/BC.01/2022 tanggal 11 Oktober 2022)



Zonasi	Satuan Kerja Wilayah	Tempat	Kota	Metode Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
Zona 1	Kanwil DJBC Aceh Kanwil DJBC Sumatera Utara	Kanwil DJBC Sumatera Utara,GKN Medan	Medan	Luring	14 s.d. 16 Agustus 2023
Zona 2	Kanwil DJBC Riau Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau KPU Bea Cukai Tipe B Batam	Kanwil DJBC Riau	Pekanbaru	Luring	22 s.d. 24 Agustus 2023
Zona 3	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	KPPBC TMP C Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	Hybrid	14 s.d. 16 Agustus 2023
Zona 4	Kanwil DJBC Jawa Barat Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	Kanwil DJBC Jawa Barat	Bandung	Luring	22 s.d. 24 Agustus 2023
7 5	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	Balikpapan	Hybrid	5 s.d. 7 September 2023
Zona 5	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	Banjarmasin		
Zona 6	Kanwil DJBC Jawa Timur II Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT	Aula Kecak Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT	Bali	Luring	29 s.d.31 Agustus 2023
Zona 7	Kanwil DJBC Jawa Timur I Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	KPPBC TMP C Bojonegoro	Bojonegoro	Luring	29 s.d.31 Agustus 2023
Zona 8	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	Makassar	Luring	22 s.d. 24 Agustus 2023
Zona 9	Kanwil DJBC Maluku Kanwil DJBC Khusus Papua	Kanwil DJBC Maluku	Ambon	Hybrid	29 s.d.31 Agustus 2023
Zona 10	Kantor Pusat DJBC Kanwil DJBC Jakarta Kanwil DJBC Banten KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta	Aula Sabang Kantor Pusat DJBC	Jakarta Timur	Luring	9 s.d. 11 Agustus 2023

Jadwal Penyusunan





18 Sept s.d. 04 Okt

Analisis Lanjutan dan Penyampaian Berkas Eselon I kepada Biromadan



29 s.d. 31 Agus

Penyusunan Sesi III

Penyusunan Sesi IV

5 s.d. 7 Sep

Asistensi

Asistensi

13 s.d. 16 Agustus Asistensi Penyusunan

Sesi I

21 s.d. 25 Agustus

Asistensi Penyusunan Sesi II

TARGET

Sampai Oktober 2023 berkas perencanaan kebutuhan BMN T.A. 2025 di lingkungan DJBC dapat disampaikan kepada Biromadan secara lengkap dan valid baik dari sisi formal maupun substansi

00

136 Satker 18 Kanwil 2 Kanwilsus

3 KPU BC

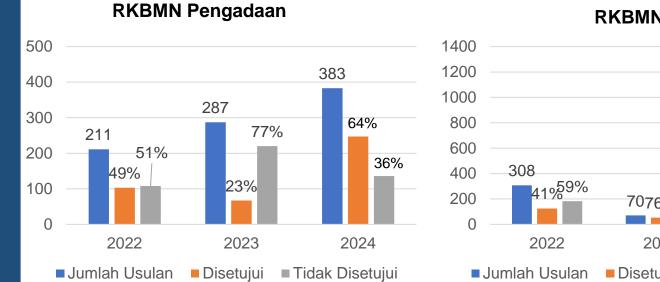
1 Kantor Pusat

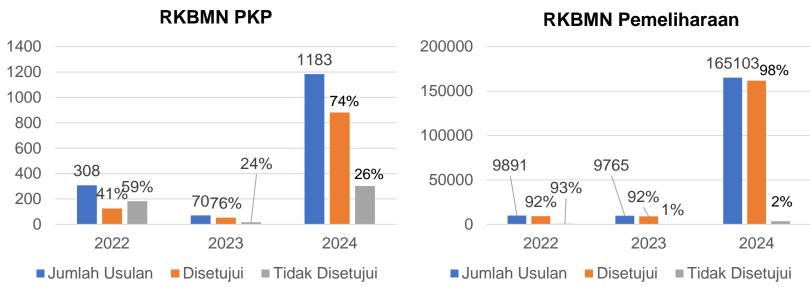


9 s.d. 11 Satker Pembukaan



Trend RKBMN 3 Tahun Penyusunan Terahir (T.A. 2022-2024) DJBC







Pada RKBMN tahun 2024 terjadi kenaikan jumlah usulan dikarenakan adanya pemberlakuan kendaraan fungsional dan perangkat pengguna sebagai objek RKBMN-PKP, dan Pemberlakuan seluruh BMN diusulkan RKBMN Pemeliharaan;

Alasan Tidak Disetujui RKBMN DJBC T.A. 2024

RKBMN Pengadaan	RKBMN PKP
Moratorium Sepeda Motor di Wilayah DKI Jakarta, Ibu Kota Provinsi	Optimalisasi eksisting
Moratorium Rumah Negara di Pulau Jawa dan Madura	Eksisting melibihi SSSJ
Usulan bukan untuk penggantian	Usulan telah diusulkan pada satker 1 kota
Eksisting melebihi SBSK	Bukan objek RKBMN
Bukan Objek RKBMN	Usulan pada RKBMN Pengadaan ditolak
Akan direvisi pada tahun berjalan	

Hasil RKBMN pada Anggaran DJBC 2 Tahun Terakhir (T.A. 2021-2022)



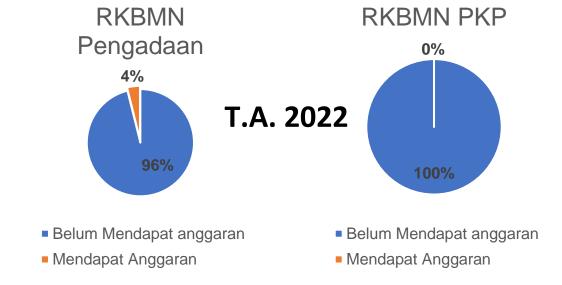
Urajan		RKBMN Pengadaan		RKBMN PKP	
	Uraian		%	Jumlah	%
RKBMNT.A. 2021					
Usulan pada RKBMN		218		137	
Usulan yang disetujui pada RKBMN		78	36%	104	76%
	Telah mendapat anggaran	23	29%	48	46%
	Belum mendapat anggaran	55	71%	48	46%
	Anggaran yang diberikan masih kurang dari jumlah yang disetujui	0	0,00%	8	7,69%
RKBMNT.A. 2022					
Usulan pada RKBMN		211		136	
Usulan yang disetujui pada RKBMN		103	49%	68	50%
	Telah mendapat anggaran	7	7%	0	0%
	Belum mendapat anggaran	96	93%	68	100%

Usulan yang telah mendapat persetujuan pada RKBMN yang diberikan anggaran tidak lebih dari 50%, bahkan pada tahun 2022 RKBMN-PKP yang telah disetujui 100% tidak mendapat alokasi anggaran.

Beberapa penyebab adalah:

- Ketersediaan anggaran secara umum dan anggaran belanja modal yang terbatas;
- Terdapat prioritas untuk pos belanja lainnya masa pandemi dan recovery





Program Pemenuhan Sarana Prasarana Kementerian Keuangan



Leader's Offsite Meeting (LOM)



Leader's Offsite Meeting (LOM) Kemenkeu terkait Sarana Prasarana Hunian Pegawai

Arahan Menteri Keuangan pada LOM tanggal 19 Januari 2023 di Batu:

- □ Lakukan stock taking rumah dinas dan bangunan gedung kantor serta menyusun standar serta program kerja sampai dengan 2024.
- DJKN, DJA, Setjen (Biro Madan, Biro Cankeu), bersama seluruh UE1 untuk mengkaji mengenai rumah dinas dan gedung kantor bagi pegawai di daerah.
- □ Susun crash program terkait perbaikan rumah dinas dan gedung kantor dapat diselesaikan dan dilaporkan dalam satu bulan (akhir Februari 2023).
- □ Belanja modal dan belanja barang harus diprioritaskan untuk memperbaiki fasilitas rumah dinas dan gedung kantor bagi pegawai.

Hasil Stock Taking Rumah Dinas di Lingkungan DJBC

Jumlah Eksisting Rumah Negara 4.022 NUP / SBSK 9.828 NUP

114 Satker / 136 total satker DJBC



Dikuasai / digunakan sesuai tusi

3.660 NUP

- 1.869 NUP kondisi Baik
- 1.275 NUP kondisi Rusak Ringan
- 516 NUP kondisi Rusak Berat



Lokasi jauh / tidak ditempati (Idle)

137 NUP

Eks perpindahan lokasi Kantor (KPPBC Labuan Bajo, Sumbawa) dll.



Dikuasai pihak ketiga / sengketa

- Sebanyak 22 Satker belum memiliki Rumah Negara;
- Sebanyak 99 Satker jumlah eksisting Rumah Negara belum memenuhi SBSK.

Estimasi Anggaran Pemenuhan Kebutuhan Rumah Negara **Seluruh DJBC**



- Rp520.185.593.867
- •Rumah Negara kondisi Rusak Ringan

Rekonstruksi

- •Rp311.469.271.171
- •Rumah Negara kondisi Rusak Berat

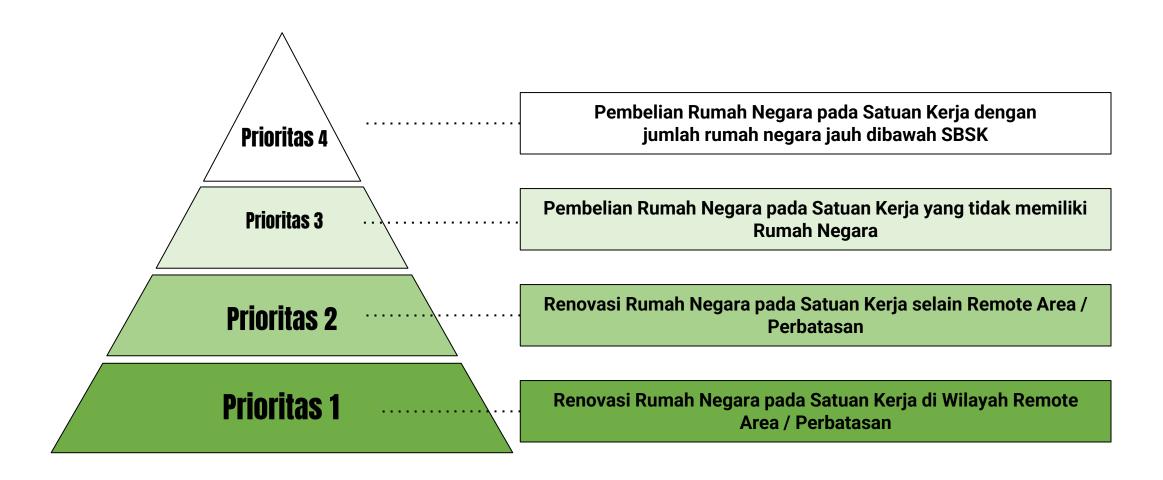
Pembangunan

- •Rp3.990.520.000.000
- Satker belum memilii rumah negara/jumlah eksisting kurang dari SBSK

Total kebutuhan anggaran **Rp 4.882.174.865.038**

Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Rumah Negara DJBC





^{*}Sesuai arahan Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah melihat kondisi di lapangan agar Rumah Negara Eksisting dilakukan pemeliharaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan Rumah Negara

Rencana Timeline Pemenuhan Kebutuhan Rumah Negara





Renovasi Rumah Negara pada Satker Remote & Perbatasan 3. (prioritas 1)

Renovasi Rumah Negara pada Satker selain Remote & Perbatasan (prioritas 2)



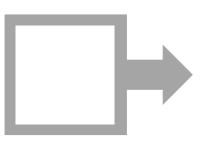
2024

- . Renovasi Rumah Negara pada Satker Remote & Perbatasan (prioritas 1)
- 2. Renovasi Rumah Negara pada Satker selain Remote & Perbatasan(prioritas 2)
 - Pembelian Rumah Negara pada Satker yang tidak memiliki Rumah Negara (prioritas 3)



2026

- Renovasi Rumah Negara pada Satker selain Remote & Perbatasan (prioritas 2)
- 2. Pembelian Rumah Negara pada Satker yang tidak memiliki Rumah Negara (prioritas 3)



2027

1. Renovasi Rumah Negara pada Satker selain Remote & Perbatasan (prioritas 2)

2025

2. Pembelian Rumah Negara pada Satker yang tidak memiliki Rumah Negara (prioritas 3)

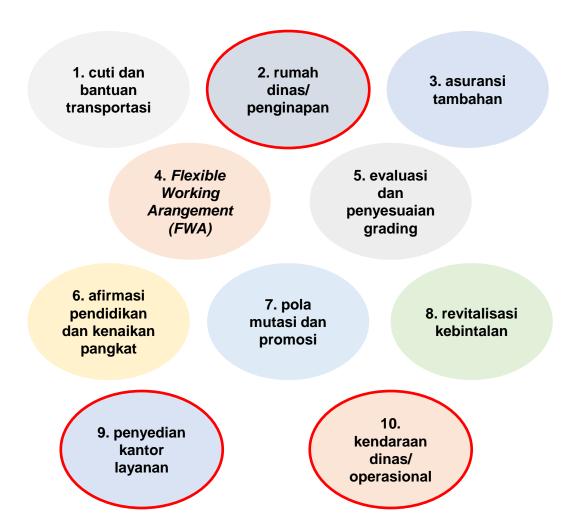
- Renovasi Rumah Negara pada Satker selain Remote & Perbatasan (prioritas 2)
- Pembelian Rumah Negara pada Satker yang tidak memiliki Rumah Negara (prioritas 3)
- 3. Pembelian Rumah Negara pada Satker dengan jumlah Eksisting jauh dibawah SBSK (prioritas 4)

Program Pemenuhan Sarana Prasarana Kementerian Keuangan



Perbaikan Ekosistem Kerja Kementerian Keuangan

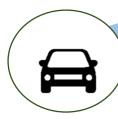
Meliputi 10 usulan aspek perbaikan



- Program dimulai pada tahun 2023 untuk seluruh Unit Eselon I Kemenkeu:
- ✓ Telah dibentuk task force perbaikan ekosistem kerja Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri dan Wakil Menteri Keuangan;
- ✓ Terkait sarana prasarana tergabung dalam Subtim Perbaikan Fasilitas Kantor, Penyediaan Wisma, & Rumdin;
- ✓ Terkait detail program akan disampaikan melalui KMK



Hal Baru pada Penyusunan RKBMN T.A. 2025



Kebutuhan Kendaraan Listrik

Berdasarkan Surat Menkeu nomor S-298/MK.6/2023, pengadaan kendaraan diprioritaskan berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), namun apabila terdapat pertimbangan beberapa hal, seperti belum tersedianya insfrasturktur mobil listrik, ketersediaan pemeliharaan dll, masih dimungkinkan untuk pengadaan kendaraan konvensional dengan terlebih dahulu meminta izin kepada instansi terkait

Standar Spesifikasi Kendaraan Jabatan

Kualifikasi	Jenis	Spesifikasi
(1)	(1) (2)	
	Sedan	250 kW
А	Sport Utility Vehicles (SUV)/ Multi Purpose Vehicles (MPV)	250 kW
	Sedan	215 kW
В	SUV	200 kW
С	Sedan	135 kW
	SUV	160 kW
D	SUV	150 kW
E	SUV	125 kW
F	MPV	120 kW
6	MPV	75 kW
G	Sepeda Motor	5 kW

Standar Biaya Masukan Pengadaan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp966.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000

Standar Biaya Masukan Pemeliharaan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Negara	Unit/Tahun	Rp14.840.000
2.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp11.100.000
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
4.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp10.460.000
5.	Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000

Standar Spesifikasi Kendaraan Operasional

Jenis	Spesifikasi
MPV	75 kW
Sepeda Motor	5 kW



Hal Baru pada Penyusunan RKBMN T.A. 2025



Kebutuhan Mess

Merupakan alternatif hunian pegawai selain rumah negara dan rusunara, usulan kebutuhan mess untuk hunian pegawai harus diusulkan pada RKBMN dengan memperhitungkan jumlah rumah negara eksisting.

Formulasi perhitungan kebutuhan mess adalah standar luas rumah negara tipe E (36 m2) x 50% jumlah pegawai ideal/eksisting mana yang lebih besar



Moratorium BMN

- ✓ Berdasarkan hasil Leader's Offsite Meeting (LOM), moratorium rumah negara di Pulau Jawa dan Madura dicabut;
- ✓ Moratorium sepeda motor di Ibu Kota Provinsi dicabut dengan ketentuan pengadaan dibatasi hanya untuk penggantian dan berupa kendaaraan listrik;
- ✓ Pengadaan kendaraan jemputan masih dilakukan moratorium

Evaluasi RKBMN pada Penyusunan RKAKL



Hasil RKBMN yang disusun 2 tahun sebelumnya (T-2) muncul permasalahan pada saat penyusunan RKAKL yang disusun 1 tahun sebelumnya (T-1)

Sewa Tanah dan/atau Bangunan Tidak Diajukan pada RKBMN

Masih terdapat Satker yang melakukan sewa tanh/bangunan untuk gedung kantor utama namun tidak diusulkan pada RKBMN





Sewa Kendaraan Operasional Tidak Diajukan pada RKBMN

Terdapat Satker yang memiliki sewa kendaraan operasional, selain kendaraan jabatan dan kendaraan fungsional (kendaraan khusus), yang tidak diajukan terlebih dahulu pada RKBMN

Perbedaan Usulan Pemeliharaan pada RKAKL dengan Eksisting BMN

Usulan/jumlah pemeliharaan yang diusulkan pada RKAKL berbeda dengan jumlah eksisting BMN pada SIMAN





Data Master Aset yang Kurang Valid

Data BMN pada Master Aset masih tidak valid, sehingga memengaruhi pada usulan RKAKL..

Contoh: AC Central yang masih tercatat gabung dengan bangunan, AC Central yang tercatat sebagai AC Split, pencatatan tidak sesuai dengan barangnya

Dokumen Pendukung yang Tidak Lengkap

Masih ditemukan usulan yang tidak dibarengi dengan dokumen pendukung.

Contoh : dokumen pendukung berupa analisa atau perhitungan biaya dari PUPR untuk pembangunan gedung





Usulan yang Telah Disetujui RKBMN tidak Dilanjutkan prosesnya pada RKAKL

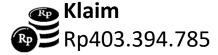
Seringkali kurangnya koordinasi antara unit Keuangan dengan Unit Rumah Tangga, sehingga usulan yang sudah mendapat persetujuan pada RKBMN tidak diusulkan pada RKAKL

Besaran Usulan dan Realisasi Asuransi BMN DJBC 3 Tahun Terakhir



Jumlah BMN 312 NUP





T.A. 2021 Jumlah BMN 310 NUP



Nilai Pertanggungan Rp1.588.372.212.882



Klaim Rp185.289.375

T.A. 2022 Jumlah BMN 353 NUP



Nilai Pertanggungan Rp1.450.270.274.563



Klaim Rp149.631.174

T.A. 2023

Klaim asuransi digunakan untuk beberapa kejadian pada Satker di antaranya:

Tahun 2021: Kerugian materil akibat Banjir pada BLBC Kelas I Jakarta, gempa pada KPPBC TMP C Kupang, Gedung kantor terbakar pada KPPBC TMP C Ambon

Tahun 2022 :gempa pada Kanwil DJBC Jatim II

Tahun 2023: Pagar roboh karena banjir pada Kantor Pusat DJBC pada 2021



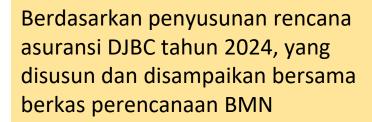
Evaluasi Penyusunan Asuransi BMN T.A. 2024



Masih terdapat satker yang mengusulkan fasiltas objek yang tidak dianjurkan seperti CCTV,dan barang inventaris lainnya.



Masih terdapat satuan kerja yang tidak mengusulkan asuransi padahal mempunyai aset yang sudah ditentukan oleh peraturan dan memiliki risiko bencana yang tinggi





Satuan Kerja yang asetnya diusulkan Asuransi apabila terkenda dampak bencana wajib mengusulkan klaim asuransi ke sesditjen dengan nilai yang sesuai dengan nilai yang dibayarkan dahulu (*prepaid*)





Evaluasi Penyusunan RP4 BMN Periode 2023, 2024, 2025



Aplikasi

Masih terdapat beberapa bug / permasalahan teknis pada Apliksi E-Prime Aset



Metode Penyusunan

Penyusunan RP4 dilakukan sebanyak 2 kali menggunakan aplikasi yang berbeda, sehingga menyebabkan banyak perbedaan data;

Penyusunan secara online / daring membuat koordinasi menjadi lebih sulit;



Pemahaman Materi

Materi terkait RP4 BMN serta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya perlu dipelajari sehingga penyusunan dapat dilakukan secara benar dan tepat

Operator yang sering berganti-ganti

Capaian DJBC pada *BMN Award* Kemenkeu 2 Tahun Terakhir (2021-2022)



Satker Kecil : Jumlah BMN s.d. 500 NUP

Satker Sedang: Jumlah BMN 501 s.d. 1.000 NUP

Satker Besar : Jumlah BMN > 1.000 NUP

2021

Adapun Kategori penilaian BMN Award terdiri atas 6 kategori, yaitu:

- Kategori Kualitas Perencanaan BMN;
- Kategori Utilisasi dan Optimalisasi BMN;
- Kategori Pengamanan BMN;
- Kategori Ketertiban dan Ketepatan Waktu Penghapusan BMN;
- Kategori Kualitas Data Master Aset; dan
- Kategori Kualitas Laporan BMN;

Kategori Kualitas Utilisasi dan Optimalisasi BMN KPPBC TMC Kudus (Juara 1 Satuan Kerja Besar)

Kategori Kualitas Pengamanan BMN Kantor Pusat DJBC (Juara 1 Satuan Kerja Besar)

Kategori Kualitas Data Master Aset Kantor Pusat DJBC (Juara 1 Satuan Kerja Besar)

2022

2022, penilaian BMN Award dimaksud terdiri dari 6 (enam) kategori, yaitui:

- Kategori Kualitas Perencanaan BMN:
- Kategori Utilisasi dan Optimalisasi BMN;
- Kategori Pengamanan BMN;
- d. Kategori Penghapusan BMN;
- Kategori Kategori Kualitas Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN;
- Kategori Kualitas Laporan BMN.

Kategori Kualitas Perencanaan BMN

Kantor Pusat DJBC (Juara 1 Satuan Kerja Besar)

Kategori Kualitas Utilisasi dan Optimalisasi BMN

Kanwil DJBC Sumatera Utara (Juara 1 Satuan Kerja Besar)

Kategori Kualitas Laporan Pengawasan dan Pengendalian KPPBC TMP C Kuala Tanjung (Juara 1 Satuan Kerja Besar)

Pada BMN Award DJBC juara pada Satker Besar semua, belum ada yang Satker Kecil dan Satker Sedang

Terima Kasih



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI